

Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi

Bob Sugeng Hadiwinata*

Abstract

Disillusions with the limits of parliamentary politics and the increasingly dilapidated processes of party politics have generated a renewed interest on civil society as a means of rejuvenating public life. In light of mounting animosity against the "high politics" of political parties, parliament, and constitution, civil society is perceived as the diagnosis as well as cure for current ills in politics. This led to glorification of civil society as an alternative to conventional practice of politics. However, experience from new democracies suggests that civil society has been increasingly tampered with cranks, extremists, rejectionists, and crooks. This paper attempts to present two faces of civil society: civil and uncivil; and tries to relate them to democratization. Drawing on Indonesian experience, it argues that civil society can be both supportive and destructive to democracy.

Kata-kata Kunci:

civil society; demokratisasi; politik Indonesia

* **Bob Sugeng Hadiwinata** adalah alumni FISIPOL-HI Universitas Gadjah Mada dan dosen tetap FISIP Universitas Parahyangan, Bandung; dan mantan Alexander von Humboldt Fellow di *Indonesia Research Unit (IRU)*, Universitas Giessen, Jerman.

Pendahuluan

Belakangan ini diskusi mengenai *civil society* (masyarakat sipil atau masyarakat madani) semakin marak. Di banyak negara, *civil society* dianggap sebagai aktor sentral dalam proses “demokratisasi gelombang ketiga” sebagaimana digambarkan oleh Samuel Huntington. Dipahami sebagai diagnosis bagi berbagai macam “penyakit” demokrasi akibat pembusukan partai politik, krisis kepercayaan terhadap parlemen, kecenderungan para politisi untuk berperilaku curang, hilangnya ideologi orsospol, dan sebagainya, *civil society* seolah-olah mendapat tempat yang sakral dalam analisis politik. Para pakar bahkan sepakat bahwa *civil society* merupakan “*the idea of the late twentieth century*” (gagasan terpenting pada akhir abad ke-20 ini).² Maka tidak mengherankan jika para pakar cenderung menempatkan *civil society* sebagai aktor utama yang berperan dalam memprovokasi kejatuhan rejim-rejim otoriter dan dalam mempromosikan demokrasi di dalam masyarakat.

Tidak sedikit pengamat politik yang “kecolongan” dengan mengagung-agungkan *civil society* sebagai sebuah kekuatan yang dapat menyulap sistem politik dalam sekejap menjadi demokrasi dan juga sekaligus harapan bagi demokrasi untuk berfungsi secara optimal. Mereka mulai membayangkan bahwa tanpa *civil society* yang hidup (*vibrant civil society*) maka demokrasi pun tidak akan hidup. Ketika membahas tentang politik organisasi non-pemerintah (ORNOP) di Indonesia,³ saya pun termasuk pendukung gagasan bahwa ORNOP sebagai elemen penting dari *civil society* telah memainkan peran penting dalam menanamkan prinsip *people's sovereignty* (kedaulatan rakyat) pada masyarakat, sehingga proses transisi menuju demokrasi pun tidak membuat rakyat terkaget-kaget. Melalui berbagai seminar, diskusi,

¹ Bahasan lebih mendalam tentang demokratisasi gelombang ketiga dapat dilihat pada Samuel P. Huntington (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. London: University of Oklahoma Press.

² Sunil Khilnani (2001). ‘The Development of Civil Society.’ Dalam S. Khilnani dan S. Kaviraj (eds.). *Civil Society: Histories and Possibilities*. Cambridge: Cambridge University Press.

³ Lihat Bob S. Hadiwinata (2003). *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. New York dan London: Routledge.

pelatihan, dan pengembangan diskursus (*discourse making*), ORNOP secara tidak langsung telah mempersiapkan rakyat untuk mengadopsi nilai-nilai demokratis. Namun demikian, di dalam buku itu saya juga mengingatkan bahwa ORNOP sebagai bagian dari *civil society* memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal representasi (benarkah ORNOP mewakili rakyat?), akuntabilitas (kepada siapa dan bagaimana ORNOP harus mempertanggungjawabkan setiap aksinya?), dan norma (benarkah ORNOP telah mempraktekkan prinsip demokrasi secara internal?)⁴

Pengalaman demokratisasi Eropa Timur telah “menjebak” para pakar politik untuk menaruh *civil society* di tempat yang “sakral” dalam berbagai analisis politik. Mary Kaldor, misalnya, menyatakan bahwa *civil society* adalah sebuah “*ethical arena*” (entitas etis), di mana kelompok-kelompok yang patuh hukum, menghargai hak azasi manusia, mengembangkan sikap toleran, dan anti-kekerasan berkumpul.⁵ Sementara itu Robert Putnam berpendapat bahwa *civil society* – yang dipahami sebagai segala bentuk kehidupan sosial yang terorganisir dan terbuka bagi semua kalangan, menganut prinsip sukarela, dan tumbuh secara mandiri – merupakan inti dari demokrasi. Tanpa *civil society* yang tumbuh secara subur, maka demokrasi tidak bakal dapat dipertahankan. Bagi Putnam, *civil society* merupakan tempat perbedaan kepentingan dinegosiasikan sehingga kehadirannya dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam merepresentasi kepentingan dan sekaligus memperluas partisipasi politik.⁶ Dalam konteks demokratisasi, para pakar transisi demokratis merasa yakin bahwa *civil society* telah memainkan peran penting dalam berbagai tahap transisi menuju demokrasi. Pada tahap “liberalisasi”, *civil society* berperan dalam proses konstruksi hak-hak individu dan perluasan ruang gerak

⁴ Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini, lihat Bob S. Hadiwinata (2003). *The Politics of NGOs in Indonesia...*, *op cit.*

⁵ Mary Kaldor (1999). ‘Transnational Civil Society.’ Dalam Tim Dunne dan Nicholas Wheeler (eds.). *Human Rights in Global Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, hal. 96.

⁶ Lihat Robert D. Putnam (1996). ‘Bowling Alone: America’s Declining Social Capital.’ Dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (eds.). *The Global Resurgence of Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

bagi masyarakat (*public space*). Pada tahap "transisi", *civil society* memprovokasi kejatuhan rejim-rejim otoriter melalui berbagai protes, demonstrasi dan berbagai aksi jalanan lainnya. Sedangkan pada tahap "konsolidasi", *civil society* dianggap berperan dalam upaya pembentukan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab kepada rakyat (*good governance*) serta upaya untuk memastikan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya aturan main yang berlaku (*the only game in town*).⁷

Ketika sebuah konsep mengalami sakralisasi, maka pertanyaan kritis patut diajukan: benarkah *civil society* merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi? Benarkah *civil society* selalu memberi kontribusi positif terhadap demokrasi? Tulisan ini mencoba untuk memusatkan bahasan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tulisan ini sekadar mengingatkan bahwa sakralisasi terhadap konsep *civil society* dapat menjebak kita ke dalam keyakinan berlebihan akan potensi *civil society*; dan pada saat bersamaan melupakan keterbatasan *civil society*. Ketika kita mengasosiasikan *civil society* dengan demokrasi, maka kita mengabaikan kekuatan tertentu di dalam masyarakat seperti kaum ekstrimis, fanatis, milisi, dan preman yang mau tidak mau merupakan bagian dari *civil society* yang berpotensi untuk mengganggu proses demokratisasi dan bahkan membuat konsolidasi menjadi sulit dicapai.

Pengalaman beberapa negara Afrika yang masuk ke dalam kategori "*failed state*" (negara yang gagal) seperti Liberia, Sierra Leone, Kongo, dan bahkan Nigeria menunjukkan bahwa berbagai kelompok milisi dan preman (yang berkolaborasi dengan para politisi) menjadi bagian dari instrumen politik yang mengintimidasi lawan melalui cara-cara kekerasan (penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan). Demokrasi menjadi suatu ajang aktivitas politik yang sangat mengerikan.⁸ Melihat

⁷ Juan Linz dan Alfred Stepan menyatakan bahwa salah satu indikator penting bahwa sebuah sistem politik memasuki tahap "konsolidasi" ketika demokrasi diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai "the only game in town", lihat J. Linz dan A. Stepan (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

⁸ Lihat William Reno (2005). 'The Politics of Violent Opposition in Collapsing States.' *Government and Opposition*, Vol.40, No.2.

peran kelompok ekstremis, milisi dan preman dalam proses politik, maka para pengamat merasa pesimis tentang masa depan demokrasi di kawasan tersebut. Pengalaman Afrika menunjukkan kepada kita bahwa kelompok-kelompok yang masuk ke dalam definisi *civil society*, sebagaimana dikemukakan Putnam, ternyata justru berperan dalam proses penghancuran demokrasi. Melalui berbagai aktivitas predatorial (penguasaan areal pertambangan, pengontrolan jalur distribusi bahan pangan, mengancam penduduk yang tidak mau berurusan dengan mereka, melakukan pemerasan di sana-sini, dan sebagainya) mereka melumpuhkan sistem politik demokratis yang sedang dibangun. Tentu saja mereka eksis karena mendapat perlindungan justru dari kalangan politisi yang memakai kelompok-kelompok tersebut sebagai wahana politik dan sekaligus kekuatan untuk menakut-nakuti lawan.

Di Eropa Timur pun, tepatnya setelah menjalani demokrasi selama sekitar satu setengah dekade, tidak sedikit pakar yang menunjukkan kekecewaan mereka kepada *civil society*. Kopecky dan Mudde, misalnya, menyatakan bahwa konsep *civil society* perlu mengalami perombakan total, karena kegagalannya memasukkan elemen-elemen ekstremisme, kebencian etnis, bandit, dan para-militer telah mempersulit para pengamat dalam menganalisis peran *civil society* di Yugoslavia, eks-Uni Soviet, Macedonia, dan sebagainya.⁹ Pengalaman negara-negara demokrasi baru di Asia pun menunjukkan adanya elemen di dalam *civil society* yang berpotensi untuk merusak demokrasi yang tengah dibangun. Di Filipina, Thailand dan Indonesia, ekstremisme telah menodai demokrasi. Keterlibatan kelompok ekstrim keagamaan dalam berbagai aksi teror telah memaksa pemerintahan demokratis di ketiga negara tersebut untuk mengkompromikan prinsip-prinsip hak azasi manusia dengan membuat undang-undang yang membolehkan aparat keamanan untuk bertindak melebihi proposinya. Di Filipina, berbagai operasi militer terhadap gerilyawan MILF dan kelompok Abu Sayyaf menuai kritik dari berbagai aktivis hak azasi manusia. Dalam kasus Thailand, *rating* negara itu dalam hal penegakan demokrasi menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat tindakan represif pemerintahan Thaksin dalam menangani kelompok ekstrim di Pattani. Di Indonesia,

⁹ Lihat Petr Kopecky dan Cas Mudde (2003). 'Rethinking Civil Society.' *Democratization*. Vol.10, No.3.

penegakan demokrasi mulai terancam oleh kebutuhan untuk memerangi terorisme melalui upaya pengoperasian kembali komando teritorial (koter) TNI dan pembuatan undang-undang keamanan yang membatasi privasi warganegara.

Tulisan ini mencoba untuk menyetengahkan argumen bahwa *civil society* tidak saja merupakan solusi, tetapi sekaligus juga merupakan problem bagi demokrasi. Sebagaimana dikatakan oleh Muthiah Alagappa bahwa *civil society* dapat berpotensi untuk mengembangkan demokrasi, tetapi pada saat yang sama juga dapat menderdilkan demokrasi. *Civil society* mengembangkan demokrasi ketika dia memfasilitasi pembentukan budaya politik demokratis, meminta kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya, dan mendorong masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Sementara itu, *civil society* menderdilkan demokrasi jika dia terkontaminasi oleh ekstremisme, jingoisme (nasionalisme berlebihan), premanisme, dan berbagai tindakan¹⁰ melawan hukum yang dapat memicu instabilitas sosial-politik.

Dua Wajah “Civil Society”

Ketika *civil society* dikaitkan dengan demokrasi, maka kontaminasi liberalisme menjadi tidak terelakkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan kembali gagasan *civil society* pada dekade 1970-an dan 1980-an – setelah lama dilupakan orang sejak pertama kali diperkenalkan oleh para tokoh “*the Scottish enlightenment*” (pencerahan di Skotlandia) seperti Adam Fergusson, John Locke, dan John Stuart Mill – ditandai oleh sebuah janji untuk membentuk masyarakat yang aman-sejahtera dengan pengakuan terhadap hak-hak individu. Sebagaimana dikemukakan Geoffrey Hawthorn: “secara konvensional dapat dikatakan bahwa ketika liberalisasi diperkenalkan, maka hasil

¹⁰ Lihat Muthiah Alagappa (2004). ‘Civil Society and Political Change.’ Dalam M. Alagappa (ed.). *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. Stanford: Stanford University Press.

¹¹ Bob S. Hadiwinata (forthcoming). ‘From Heroes to Trouble Makers: Civil Society and Democratization in Indonesia.’ Dalam Andreas Uffen dan Marco Buente (eds.). *Democratization in Indonesia: From Neo-patrimonial Rule to a Hybrid Regime*. Copenhagen: NIAS.

akhirnya adalah sebuah sistem demokrasi-liberal; dan untuk membuat sistem ini berfungsi dengan baik, maka diperlukan kehadiran *civil society*".¹²

Kontaminasi liberalisme menjadikan *civil society* sebuah konsep yang kaku dan eksklusif, yakni hanya terkait dengan nilai-nilai demokrasi-liberal. Konsekuensinya, *civil society* dianggap hanya bisa eksis di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi-liberal. Philippe Schmitter, misalnya, menyatakan bahwa *civil society* harus mengemban empat macam nilai: otonomi, aksi kolektif, tidak berpretensi untuk memperebutkan kekuasaan (sebagaimana layaknya partai politik), dan *civil* (tunduk pada hukum dan aturan main).¹³ Dalam konteks semacam ini *civil society* hanya mengacu pada kekuatan-kekuatan yang tunduk pada hukum dan aturan main yang berlaku dan tidak mencakup kelompok-kelompok yang berupaya memaksakan kehendak mereka melalui cara-cara kekerasan seperti kaum ekstrimis, milisi, preman, dan berbagai organisasi ala mafia lainnya. Sekalipun Schmitter tidak menyangkal kemungkinan kontribusi negatif *civil society* terhadap demokrasi, dia menekankan bahwa kelompok ekstrim dan organisasi ala mafia tidak dapat disebut sebagai *civil society* karena kecenderungan mereka untuk berperilaku *uncivil* (melawan hukum).¹⁴

Pendapat ini didukung oleh Laurence Whitehead yang menyatakan bahwa berbagai bentuk kelompok religius fundamentalis barangkali harus ditoleransi oleh sistem demokrasi, tetapi mereka tidak dapat disebut sebagai bagian dari *civil society* dalam pengertian modern yang kontributif bagi demokrasi.¹⁵ Bagi Whitehead, berbagai kelompok etno-religius yang ekstrim serta organisasi-organisasi anti-sosial lainnya

¹² Geoffrey Hawthorn (2001). 'The Promise of Civil Society in the South.' Dalam S. Kaviraj and S. Khilnani (eds.). *Civil Society: Histories and Possibilities*, Cambridge: Cambridge University Press.

¹³ Philippe Schmitter (1995). 'On Civil Society and the Consolidation of Democracy: Ten Propositions.' Makalah yang tidak diterbitkan. Department of Political Science, Stanford University.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Laurence Whitehead (2004). 'Bowling in the Bronx: the Uncivil Interstices between Civil and Political Society.' Dalam P. Bunnell dan P. Calvert (eds.). *Civil Society and Democratization*. London: Frank Cass.

termasuk ke dalam kategori "*uncivil interstices between civil and political society*" (kelompok melawan hukum yang berada di antara masyarakat sipil dan masyarakat politik).¹⁶ Dengan demikian, mudah dipahami jika mereka menganggap bahwa *civil society* tidak bakal muncul di lingkungan masyarakat non-demokratis. Menulis dalam konteks China, Adrian Chan menyatakan bahwa *civil society* tidak eksis di negara itu. Karena itu, menurutnya, upaya untuk menelusuri jejak *civil society* di China tidak lebih dari sekadar *wishful thinking* (harapan yang sia-sia).¹⁷ Dengan nada yang lebih optimistis, Goffrey Hawthorn menyatakan bahwa dalam masyarakat non-demokratis kita hanya dapat menganggap *civil society* sebagai sebuah keniscayaan (*possibility*). Kalau pun dia eksis, lingkup aktivitas mereka hanya di tingkat lokal dengan konstituen yang sangat terbatas.¹⁸

Pandangan semacam ini ternyata menuai banyak kritik. Carolyn Elliott, misalnya, menyatakan bahwa dalam menganalisis *civil society* penekanan terhadap aspek normatif seharusnya tidak mengganggu seluruh struktur bangunan konsep tersebut. Analisis tersebut menggiring orang pada keyakinan bahwa masyarakat Barat merupakan model bagi *civility* (kepatuhan terhadap aturan main dan hukum).¹⁹ Ketika menganalisis tentang peran *civil society* dalam demokratisasi di negara-negara eks-Komunis di Eropa Timur, Kopecky dan Mudde berpendapat bahwa pemisahan kelompok "*uncivil*" (tidak patuh hukum) dari kelompok "*civil*" (tunduk pada hukum) tidak saja merupakan penyederhanaan berlebihan (*oversimplification*), tetapi juga membawa kita pada inkonsistensi. Sebagai contoh, gerakan nasionalis Slovakia pada periode 1990-1992 seringkali dianggap sebagai kelompok *uncivil* sehingga tidak dimasukkan ke dalam kategori *civil society*; tetapi

¹⁶ Bagi Whitehead, yang membedakan antara *political society* dengan *civil society* adalah bahwa *political society* berambisi untuk memperebutkan kekuasaan politik melalui berbagai cara, sedangkan *civil society* hanya berpretensi untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan tanpa harus ikut memperebutkan kekuasaan.

¹⁷ Lihat Adrian Chan (1997). 'In Search of Civil Society in China.' *Journal of Contemporary Asia*. Vol.27, No.2, hal.242-51.

¹⁸ Geoffrey Hawthorn (2001), *op cit.*, hal.272.

¹⁹ Carolyn M. Elliott (2003). 'Civil Society and Democracy: a Comparative Review Essay.' Dalam C.M. Elliott (ed.). *Civil Society and Democracy: a Reader*. Oxford: Oxford University Press.

kelompok yang sama disebut sebagai “good” *civil society* yang ikut meruntuhkan Komunisme pada tahun 1989.²⁰ Inkonsistensi semacam ini jelas tidak membantu riset sosial-politik karena menciptakan ambiguitas yang dapat merusak keseluruhan hasil analisis.

Memperlakukan berbagai kelompok radikal dan ekstrim sebagai sesuatu di luar *civil society* tidak saja terlalu menyederhanakan persoalan, tetapi juga mengingkari kenyataan bahwa kelompok-kelompok radikal, ekstrim, maupun preman mewakili konstituensi tertentu. Banyak di antara kelompok radikal maupun ekstrim yang sungguh-sungguh mewakili suara anggota kelompoknya. Di Eropa Timur, Kopecky dan Mudde menyatakan bahwa kelompok yang disebut ORNOPs dan dianggap sebagai representasi *civil society* terlalu didominasi oleh kaum elit (karena dibentuk oleh kalangan menengah ke atas), sedangkan kelompok yang sering disebut *uncivil* seperti berbagai organisasi ethno-religius radikal²¹ justru sungguh-sungguh mewakili suara para pendukungnya. Dalam konteks Indonesia, barangkali tidak seorangpun meragukan kesungguhan kelompok seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, maupun FPI dalam menyuarakan kepentingan para pengikutnya. Bahkan kelompok etnis seperti LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah) dapat disebut sebagai organisasi yang sungguh-sungguh mewakili suara etnis Dayak setidaknya di daerah Kalimantan Tengah.

Ada sekurang-kurangnya dua alasan untuk memasukkan berbagai kelompok yang tidak patuh hukum (*uncivil groups*) sebagai bagian dari *civil society*. *Pertama*, jika *civil society* disepakati sebagai segala bentuk organisasi sosial yang menganut prinsip otonomi, sukarela dan kemandirian, maka segala macam asosiasi sosial (baik yang memperkuat maupun yang merusak demokrasi) harus diterima sebagai bagian integral dari *civil society*. Sebagaimana dikemukakan oleh Neera Chandhoke: “Jika *civil society* terdiri dari berbagai asosiasi sosial *per se*, maka kita harus menerima semua jenis asosiasi (yang baik maupun yang buruk) sebagai bagian dari *civil society*”.²² Chandhoke

²⁰ Petr Kopecky dan Cas Mudde (2003), *op cit.*

²¹ *Ibid.*

mengemukakan pendapat tersebut dalam rangka upayanya untuk memasukkan kelompok ekstrimis Hindu seperti *Sangh Parivar* (yang berupaya untuk memaksakan prinsip tirani mayoritas di India) sebagai bagian dari *civil society*.

Kedua, jika kita menerapkan konsep *civil society* pada masyarakat negara berkembang tempat liberalisme bukan merupakan tradisi masyarakat tersebut, maka *civil society* tidak bisa diasosiasikan dengan berbagai kekuatan yang selalu mendukung demokrasi. Ketika membahas tentang karakter *civil society* di India, Gurpreet Mahajan menyatakan bahwa apa yang masuk ke dalam kategori *civil society* di India ternyata sarat dengan berbagai perikatan primordial seperti kasta, suku, agama, bahasa, dan sebagainya, sehingga memberikan bobot moral yang berbeda dibandingkan dengan *civil society* pada masyarakat Barat pada umumnya.²³ Hal semacam ini barangkali tidak hanya merupakan ciri *civil society* di India saja. Pada masyarakat negara berkembang lainnya asosiasi sosial yang dapat disebut sebagai *civil society* seringkali berkaitan dengan perikatan primordial. Beberapa organisasi bahkan secara eksklusif memperjuangkan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan kelompok lain dengan cara-cara kekerasan sehingga berpotensi untuk menghambat demokrasi. Kelompok-kelompok semacam ini – yang mengusung ideologi *majoritarianism* (mayoritarianisme) layak untuk disebut sebagai “bad *civil society*”. Pandangan mereka yang eksklusif, penolakan terhadap pluralitas, dan kecenderungan untuk menciptakan hegemoni bagi kelompoknya menjadikan mereka sebagai *civil society* yang dapat merusak demokrasi.

Dengan demikian, *civil society* tampil dengan dua karakter yang bertolak belakang. Sebagai asosiasi sosial yang menjunjung nilai otonomi, kesukarelaan, persamaan hak, dan *civility* (kepatuhan terhadap hukum dan aturan main), *civil society* dapat dikatakan sebagai jaringan sosial yang menjembatani antara pemerintah dengan rakyat

²² Neera Chandhoke (2003). ‘The Civil and the Political in Civil Society.’ Dalam C.M. Elliott (ed.). *Civil Society and Democracy: a Reader*. Oxford: Oxford University Press, hal.255.

²³ Gurpreet Mahajan (2003). ‘Civil Society and Its Avatars.’ Dalam C.M. Elliott (ed.). *Civil Society and Democracy: a Reader*. Oxford: Oxford University Press, hal.188.

sehingga memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi. Dalam konteks ini, kita berbicara tentang "good civil society". Di lain pihak, sebagai asosiasi sosial yang mengedepankan hegemoni kelompok di atas kelompok lain dan perebutan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, *civil society* menampilkan wajah yang buruk dan berpotensi untuk menghancurkan demokrasi. Dalam keadaan seperti ini, kita berbicara tentang "bad civil society". Dengan dua wajah yang saling bertolak belakang inilah kita harus memahami *civil society* yang ikut terlibat di dalam proses demokratisasi.

"Civil Society" dan Demokrasi Indonesia

Ketika reformasi mulai digulirkan pada tahun 1998, semua perhatian tertumpah pada kelompok mahasiswa, organisasi non-pemerintah (ORNOP), dan figur politik yang secara mendadak dibaiat menjadi "pahlawan reformasi". Pada saat yang sama kita melupakan bahwa di dalam "revolusi Mei 1998" yang diwarnai oleh kerusuhan anti-China – pengrusakan, penjarahan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan sehingga merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah Indonesia modern – yang melibatkan preman, milisi, berbagai kelompok anti-China, dan kelompok-kelompok keagamaan ekstrim lainnya. Suka atau tidak, momen yang dapat disebut sebagai "kemenangan *civil society*" yang mewarnai kejatuhan rejim Suharto ternyata terkontaminasi oleh kekerasan.²⁴ Noda yang mencoreng wajah reformasi cepat terlupakan ketika transisi menuju demokrasi ternyata tidak berjalan mulus. Berbagai kekuatan anti-reformasi dan kaum reformis setengah hati yang berlomba-lomba untuk menghapus dosa atau memenangkan dukungan dari kaum ekstrim dan garis keras melakukan berbagai upaya sehingga mereka yang paling bertanggungjawab terhadap kerusuhan tersebut tidak pernah diadili. Hingga saat ini, mereka yang diadili dan dihukum hanya terbatas pada "pelaku-pelaku lapangan" yang tertangkap basah ketika melakukan pengrusakan maupun penjarahan. Tidak satu pun upaya dilakukan

²⁴ Lihat Edward Aspinall (2004). 'Indonesia: Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough.' Dalam Muthiah Alagappa (ed.). *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. Stanford: Stanford University Press.

untuk memproses secara hukum mereka yang membuat dan menyebarkan "teori konspirasi"²⁵ sehingga menyulut kerusuhan dan memobilisasi massa untuk melakukan pengrusakan, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Peristiwa Mei 1998 menunjukkan bahwa gerakan yang pada akhirnya menjatuhkan rejim otoriter dan membuka jalan menuju demokrasi ternyata melibatkan *civil society* dengan dua wajahnya sekaligus, baik dan buruk. Dalam wajahnya yang baik, *civil society* – yang diwakili oleh kelompok mahasiswa, ORNOP, dan intelektual kampus (terutama Forum Rektor) – bersama-sama ikut dalam gerakan menentang Orde Baru yang sekaligus membuka jalan bagi demokrasi. Dalam wajahnya yang buruk, *civil society* (yang diwakili oleh kaum preman, para-militer, dan kaum ekstremis) telah menciptakan ketidakstabilan sosial, teror, dan bahkan kemudian konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Suka atau tidak, kita harus menerima kenyataan bahwa reformasi juga melibatkan apa yang disebut sebagai "uncivil" atau "bad" *civil society* yang mengambil keuntungan dari situasi kacau untuk kepentingan mereka sendiri, yakni melampiaskan nafsu chauvinis dan kehausan mereka akan kekuasaan.

Pada masa pasca kejatuhan rejim otoriter, salah satu tahap demokrasi yang paling krusial adalah "konsolidasi". Larry Diamond mendefinisikan konsolidasi sebagai tahap ketika para aktor politik (di lingkaran elit maupun massa) dalam jumlah yang signifikan meyakini bahwa demokrasi merupakan satu-satunya norma dan instrumen politik yang secara realistis dapat diberlakukan.²⁶ Sementara itu, Juan Linz dan Alfred Stepan menyatakan bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan telah mencapai tahap konsolidasi jika pihak-pihak yang terlibat dalam kompetisi politik (untuk memperebutkan kekuasaan di pemerintahan maupun legislatif) meyakini bahwa demokrasi (termasuk sistem hukum, lembaga, dan prosedur yang menyertainya) merupakan satu-

²⁵ Mengenai selebaran bertajuk "Konspirasi Mengguling Suharto" yang disebarakan beberapa saat menjelang kerusuhan Mei 1998 dapat dilihat pada Robert Hefner (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.

²⁶ Lihat Larry Diamond (1999). *Developing Democracy: Toward a Consolidation*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, hal.65.

satunya aturan main yang berlaku (*the only game in town*), yakni satu-satunya kerangka yang mengatur pencapaian kepentingan.

Bagi para teoretisi transisi menuju demokrasi tersebut, segala bentuk penolakan terhadap demokrasi – apa yang oleh Juan Linz disebut “*manifestation of disloyalty*” – cenderung menciptakan kerentanan, instabilitas politik, dan bahkan kemunduran proses demokrasi.²⁸ Dengan kata lain, demokrasi dapat terancam jika terdapat elemen di dalam masyarakat yang mempergunakan cara-cara paksaan dan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka tanpa memberikan toleransi terhadap pihak lain yang juga merupakan bagian dari komunitas tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Larry Diamond: “Jika demokrasi ingin mencapai tahap konsolidasi, maka eksistensi berbagai kekuatan yang mengandalkan pada ekstremisme, pemaksaan dan kekerasan harus dibatasi seminimal mungkin. Jika tidak, maka demokrasi akan menjurus pada kekacauan yang berkepanjangan dan bahkan kebangkrutan.”²⁹

Keganasan *Uncivil Society* dan Ancaman terhadap Demokrasi

Bagaimana cara *civil society* mengancam demokrasi? Indonesia merupakan contoh yang menarik untuk dibicarakan. Di Indonesia, apa yang oleh Juan Linz disebut dengan *manifestation of disloyalty* datang dari kelompok-kelompok ekstrim etnis-keagamaan. Kelompok keagamaan memiliki porsi lebih besar seiring dengan meningkatnya ketegangan antar agama. Sekalipun banyak kelompok ekstrim Islam dibentuk pada masa pasca Suharto, keberadaan ekstremisme Islam sesungguhnya dapat ditelusuri sejak awal dekade 1990-an. Terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor yang mendorong kebangkitan ekstremisme Islam di Indonesia pada waktu itu.

Pertama, konflik etno-religius di Balkan tempat kaum Muslim Bosnia menjadi korban kekejaman tentara Serbia. Solidaritas terhadap kaum minoritas Bosnia dalam sekejap berubah menjadi semangat anti-Kristen yang ditandai dengan kemunculan berbagai kelompok ekstrim

²⁷ Juan Linz dan Alfred Stepan (1996). *Problems of Democratic Transition ...*, *op cit.*, hal.5.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Larry Diamond (1999). *Developing Democracy ...*, *op cit.*, hal.67.

yang mencari-cari kesempatan untuk mencederai kaum minoritas Kristen. Peristiwa Situbondo dan Tasikmalaya pada tahun 1996 merupakan contoh yang paling konkrit, ketika kaum ekstrim melakukan "pembalasan" dengan membakar puluhan gereja dan sekolah.

Kedua, kebangkitan semangat "mayoritarianisme" di kalangan kaum Muslim konservatif. Bagi mereka, sebagai warga mayoritas, kaum Muslim berhak menuntut kontrol lebih besar terhadap berbagai aspek kehidupan: politik, sosial, dan ekonomi. Melalui tulisan di berbagai media dan ceramah di seminar-seminar, beberapa cendekiawan Muslim menyuarakan ketidakadilan yang dihadapi mayoritas Muslim. Sejak saat itu, hubungan antar agama menjadi semakin tegang sehingga memunculkan berbagai organisasi bernuansa keagamaan seperti ICMI, PIKI, PHI, ISKA, dan sebagainya.

Ketiga, upaya Suharto untuk memenangkan hati kaum Muslim dengan meninggalkan pendekatan represif yang selama ini diterapkan terhadap kelompok-kelompok garis keras. Pengenduran kontrol ini dimanfaatkan oleh kaum ultra-konservatif untuk membentuk organisasi-organisasi baru atau mengaktifkan kembali organisasi-organisasi yang selama ini bergerak di "bawah tanah" akibat represi pemerintah Orde Baru.³⁰

Etnisitas juga merupakan aspek di mana *civil society* berpotensi untuk menghancurkan demokrasi. Situasi hubungan antar etnis di Indonesia pasca Orde Baru seolah-olah membenarkan pendapat Jack Snyder bahwa demokratisasi yang dilakukan secara tiba-tiba di dalam masyarakat yang pluralistis berpotensi untuk menyulut konflik dan kekerasan internal sehingga menciptakan instabilitas politik.³¹ Beberapa saat setelah Reformasi digulirkan, konflik etnis segera merebak. Di Kalimantan Tengah, sentimen anti-Madura di kalangan penduduk asli Dayak makin berkembang seiring dengan meningkatnya marjinalisasi

³⁰ Mengenai kebangkitan dan perkembangan ormas Islam pada pertengahan dekade 1990-an seperti KISDI, Humanika, DDII, dan sebagainya dapat dilihat pada Robert Hefner (2000). *Civil Islam op cit.*

³¹ Lihat Jack Snyder (2000). *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist.* New York: W.W. Norton.

di kalangan masyarakat Dayak. Sekalipun kaum imigran Madura hanya 7 persen dari total penduduk di Kalimantan Tengah, mereka memiliki andil yang besar di berbagai sektor ekonomi seperti transportasi (darat dan sungai), pertambangan, perkayuan (*logging*), dan perdagangan (formal maupun informal). Generasi pertama kaum pendatang Madura datang ke wilayah tersebut pada dekade 1960-an sebagai transmigran, yang disusul dengan gelombang pendatang yang lebih besar pada dekade 1970-an dan 1980-an. Tidak sedikit dari mereka yang sukses dalam usaha perhotelan, restoran, pompa bensin, angkutan umum, perdagangan sembako, dan lain-lain. Selama beberapa dekade, peningkatan kesejahteraan kaum pendatang Madura ini ternyata berjalan seiring dengan marginalisasi penduduk asli Dayak. Akibatnya, kebencian etnis di kalangan Dayak pun semakin memuncak.³²

Insiden kecil yang melibatkan kedua suku sudah cukup untuk menyulut kerusuhan yang lebih besar. Pada tanggal 15 Desember 2000, sebuah perkelahian antara kelompok pemuda Madura dan Dayak di sebuah bar karaoke di Kereng Pangi telah menyulut kerusuhan etnis yang mengerikan. Isu bahwa seorang Dayak terbunuh dalam perkelahian tersebut telah memobilisasi para pemuda Dayak untuk menyerang pemukiman, toko, dan kantor milik orang Madura di Kota Sampit, sehingga memaksa sekitar 1000 orang untuk lari ke hutan-hutan di sekitarnya. Pembalasan yang dilakukan kaum Madura beberapa hari kemudian ternyata memicu kerusuhan yang lebih besar dan berdarah. Selama Pebruari hingga Maret 2001, pembunuhan terhadap etnis Madura terus berlangsung dan melebar ke kota-kota lain seperti Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Kuala Kapuas. Diperkirakan 400 orang Madura tewas terbunuh dan 108.000 lainnya mengungsi ke berbagai tempat di Jawa Timur.³³

Peningkatan ketegangan antar umat beragama dan konflik etnis melibatkan elemen *civil (uncivil) society* di dalamnya. Di Maluku, keterlibatan Laskar Jihad dan mereka yang menyebut diri sebagai sisa-sisa RMS (Republik Maluku Selatan) dalam konflik berdarah yang

³² International Crisis Group (ICG) (2002). *Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan*. Jakarta dan Brussels: ICG Asia Report No.18, hal.18.

³³ *Ibid.*, hal.5.

menelan korban ribuan jiwa dan menyulut berbagai ketegangan antar agama di Indonesia mencerminkan bahwa konflik internal di dalam *civil society* sendiri ternyata tidak kalah menyeramkan dari konflik-konflik yang lain (konflik antar negara misalnya). Ketika konflik berdarah mencapai puncaknya pada periode 1999-2001, diperkirakan 5.000 orang mati terbunuh dan lebih dari 500.000 orang dipaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri dari pembantaian.³⁴ Konflik ini kemudian merembet ke Poso, Sulawesi Tengah. Di sana, Laskar Jihad berhadapan dengan kelompok yang menyebut dirinya Barisan Kelelawar. Akibat dari konflik di Maluku, ratusan orang terbunuh secara mengenaskan (beberapa diantaranya dibunuh pada saat melaksanakan ibadah), puluhan desa hancur lebur, dan lebih dari 50.000 terpaksa mengungsi ke Tentena. Baik di Maluku maupun Poso, keterlibatan *civil society* dalam memprovokasi konflik berdarah tercermin dalam sikap ekstrim untuk menolak eksistensi pihak lain dan dorongan untuk memaksakan hegemoni kalangan sendiri terhadap kelompok lain. Dalam konteks seperti ini, *civil society* secara ekstrim menolak demokrasi yang membutuhkan toleransi dan pengakuan terhadap pluralitas di dalam masyarakat.

Di Kalimantan Tengah, sebagaimana digambarkan Gerry van Klinken, organisasi benuansa etnis seperti LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah) telah berperan – baik secara langsung maupun tidak langsung – dalam memprovokasi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah untuk “memerangi” kelompok etnis Madura.³⁵ Organisasi yang pada awalnya bertujuan mulia untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat Dayak yang selama ini mengalami marjinalisasi kemudian berubah menjadi organisasi yang mendukung “pembersihan” etnis Madura. Hal ini dimungkinkan ketika para petinggi organisasi tersebut terlibat dalam persaingan memperebutkan jabatan lokal (baik di tingkat propinsi

³⁴ International Crisis Group (ICG) (2001). *Indonesia: the Search for Peace in Maluku*. Jakarta dan Brussels: ICG Asia Report No.31, hal.9.

³⁵ Informasi lebih detail mengenai peran LMMDD-KT dalam konflik etnis di Kalimantan Tengah pada Pebruari-Maret 2001 dapat dilihat pada Gerry van Klinken (2002). ‘Indonesia’s New Ethnic Elites.’ Dalam Henk S. Nordholt dan Irwan Abdullah (eds.). *Indonesia: in Search of Transition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

maupun kabupaten). Ironisnya, para politisi lokal mempergunakan isu "anti-Madura" untuk menarik simpati dan dukungan dari kaum mayoritas Dayak. Sebagaimana digambarkan dalam laporan ICG (International Crisis Group): "retorika politik anti-Madura telah dipakai para elit politik lokal untuk memobilisasi dukungan dari warga mayoritas Dayak".³⁶ Bagi mereka isu "anti-Madura" merupakan komoditas yang paling menguntungkan untuk memenangkan dukungan dari masyarakat yang sebelumnya telah terprovokasi oleh berbagai konflik sporadis yang melibatkan etnis Madura dan Dayak. Dengan melakukan apa yang oleh Michael Jacobsen disebut "etnifikasi politik lokal" (*ethnification of local politics*), para politisi berharap dapat memanipulasi ketegangan etnis untuk kepentingan politik mereka.³⁷

Para tokoh politik tersebut mungkin tidak menyangka bahwa kampanye anti-Madura yang mereka lakukan akhirnya berdampak pada pembantaian dan pengusiran masyarakat Madura.³⁸ Setelah kejadian mengenaskan tersebut, banyak kalangan masyarakat Dayak yang menyatakan penyesalannya, tetapi tidak sedikit pula yang bersyukur peristiwa tersebut sebagai kemenangan Dayak atas Madura. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu aktor intelektual pembersihan etnis Madura: "Kita telah memenangkan peperangan ... Jika mereka (etnis Madura) berani kembali, mereka akan kita sambut dengan kekerasan!".³⁹ Pernyataan semacam ini sekali lagi menegaskan bahwa semangat "hegemoni etnis" telah merasuki mereka. Jika mereka menolak untuk mengakui keberadaan etnis lain, maka pluralisme pun tidak ada di dalam kamus mereka. Maka, sulit bagi kita untuk mengharapkan prinsip demokrasi (yang menuntut adanya toleransi, pengakuan terhadap perbedaan, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan kelompok lain, dan pengakuan terhadap hak-hak kaum minoritas) ditegakkan.

³⁶ International Crisis Group (ICG) (2002). *Communal Violence in Indonesia ... loc cit.*

³⁷ Michael Jacobsen (2002). *Nation-making and the Politicization of Ethnicity in Post-Suharto Indonesia*. Hong Kong: Working paper series No.26, Southeast Asia Research Centre, The City University of Hong Kong.

³⁸ *Ibid.*, hal.5.

³⁹ Gerry van Klinken (2002). *Indonesia's New Ethnic Elites.* *op cit.*

Baik fenomena konflik agama maupun etnis sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan kepada kita bahwa *civil society* tidak kebal terhadap kemungkinan untuk dijadikan alat oleh kalangan masyarakat tertentu (biasanya yang memiliki ambisi politik berlebihan tetapi tidak memiliki cukup modal sosial-ekonomis untuk mencapainya) untuk menjalankan hal-hal yang membuat mereka menjadi "*uncivil society*" atau "*bad civil society*". Jika situasinya demikian, maka demokrasi tidak lagi dapat mengandalkan pada *civil society* dalam rangka untuk mencapai tahap konsolidasi.

Kesimpulan

Ketika kita menyadari bahwa *civil society* ternyata memiliki dua wajah yang berpotensi untuk sekaligus mendukung dan menghancurkan demokrasi, maka kita harus lebih berhati-hati dalam menyikapi kebangkitan *civil society* yang terjadi pada era reformasi ini. Kecenderungan untuk memperlakukan *civil society* sebagai sesuatu yang sakral akan membuat kita terlalu mengagung-agungkan *civil society* sebagai kekuatan yang dapat menghidupkan demokrasi. Padahal tidak semua kelompok yang masuk ke dalam kategori *civil society* dapat diandalkan dalam upaya kita untuk mencapai tahap konsolidasi demokrasi. *Civil society* menghidupkan demokrasi manakala dia memobilisasi diri untuk menumbangkan rejim-rejim otoriter, menciptakan semacam ruang publik (*public space*) bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memberikan jaminan bahwa demokrasi adalah "*the only game in town*". Sementara itu, *civil society* berpotensi untuk mengancam demokrasi ketika dia menolak pluralisme di dalam masyarakat, mengedepankan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan, menggembargemborkan hegemoni kelompok, mengingkari hak-hak kaum minoritas, dan tidak mentolerir perbedaan pandangan.

Melihat keterlibatan *civil society* dalam berbagai konflik agama maupun etnis yang terjadi di Indonesia selama ini, maka ancaman bagi demokratisasi di Indonesia tidak hanya datang dari lembaga-lembaga politik (parlemen, sistem pemilihan, partai politik, dan sebagainya), tetapi justru dari *civil society* sendiri. Kecenderungan kelompok-kelompok chauvinis dan ekstremis tersebut untuk lebih mengedepankan kekerasan daripada dialog dalam menyikapi

perbedaan pandangan dan ketidaksenangan terhadap kelompok lain telah mendatangkan ancaman bagi kelangsungan demokrasi di negeri ini. Pengalaman Indonesia ternyata mendukung pengalaman di Eropa Timur, Afrika dan India bahwa *civil society* dalam wajahnya yang “*uncivil*” ternyata berperan dalam menggerogoti demokrasi.

Tulisan ini mencoba untuk mengingatkan agar para pengamat tidak terjebak ke dalam lingkup ideologi tertentu dalam memandang *civil society*. *Civil society* hendaknya dipahami sebagai sesuatu yang netral, sehingga dia bisa berkarakter baik dan dapat memfasilitasi demokrasi untuk tumbuh dan berkembang; dan bisa juga berkarakter buruk jika dia memaksakan hegemoni identitas, nilai atau norma tertentu melalui pemaksaan dan kekerasan. Desakralisasi konsep *civil society* dapat membantu kita untuk secara lebih jernih melihat keterkaitan antara *civil society* dan demokrasi. Jika sebelumnya kita memandang *civil society* sebagai kekuatan yang identik dengan demokrasi, maka kasus Indonesia justru menunjukkan bahwa *civil society* berpotensi untuk melumpuhkan demokrasi. *****

Daftar Pustaka

- Alagappa, Muthiah (2004). ‘Civil Society and Political Change.’ Dalam M. Alagappa (ed.). *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. Stanford: Stanford University Press.
- Aspinall, Edward (2004). ‘Indonesia: Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough.’ Dalam Muthiah Alagappa (ed.). *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. Stanford: Stanford University Press.
- Chan, Adrian (1997). ‘In Search of Civil Society in China.’ *Journal of Contemporary Asia*. Vol.27, No.2.

- Chandhoke, Neera (2003). 'The Civil and the Political in Civil Society.' Dalam C.M. Elliott (ed.). *Civil Society and Democracy: a Reader*. Oxford: Oxford University Press.
- Diamond, Larry (1999). *Developing Democracy: Toward a Consolidation*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Elliott, Carolyn M. (2003). 'Civil Society and Democracy: a Comparative Review Essay.' Dalam C.M. Elliott (ed.). *Civil Society and Democracy: a Reader*. Oxford: Oxford University Press.
- Hadiwinata, Bob Sugeng (akan terbit). 'From Heroes to Trouble Makers: Civil Society and Democratization in Indonesia.' Dalam Andreas Uffen dan Marco Buente (eds.). *Democratization in Indonesia: From Neo-patrimonial Rule to a Hybrid Regime*. Copenhagen: NIAS.
- Hadiwinata, Bob Sugeng (2003). *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. New York dan London: Routledge.
- Hawthorn, Geoffrey (2001). 'The Promise of Civil Society in the South.' Dalam S. Kaviraj and S. Khilnani (eds.). *Civil Society: Histories and Possibilities*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hefner, Robert (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. London: University of Oklahoma Press.
- International Crisis Group (ICG) (2001). *Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan*. Jakarta dan Brussels: ICG Asia Report No.18.
- International Crisis Group (ICG) (2002). *Indonesia: the Search for Peace in Maluku*. Jakarta dan Brussels: ICG Asia Report No.31.
- Jacobsen, Michael (2002). *Nation-making and the Politicization of Ethnicity in Post-Suharto Indonesia*. Hong Kong: Working paper series

Bob Sugeng Hadiwinata, *Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi*

No.26, Southeast Asia Research Centre, The City University of Hong Kong.

Kaldor, Mary (1999). 'Transnational Civil Society.' Dalam Tim Dunne dan Nicholas J. Wheeler (eds.). *Human Rights in Global Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Khilnani, Sunil (2001). 'The Development of Civil Society.' Dalam S. Khilnani dan S. Kaviraj (eds.). *Civil Society: Histories and Possibilities*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kopecky, Petr dan Cas Mudde (2003). 'Rethinking Civil Society.' *Democratization*. Vol.10, No.3.

Linz, Juan dan Alfred Stepan (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Mahajan, Gurpreet (2003). 'Civil Society and Its Avatars.' Dalam C.M. Elliott (ed.). *Civil Society and Democracy: a Reader*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, Robert D. (1996). 'Bowling Alone: America's Declining Social Capital.' Dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (eds.). *The Global Resurgence of Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Reno, William (2005). 'The Politics of Violent Opposition in Collapsing States,' *Government and Opposition*, Vol.40, No.2.

Schmitter, Philippe (1995). 'On Civil Society and the Consolidation of Democracy: Ten Propositions.' Makalah yang tidak diterbitkan. Department of Political Science, Stanford University.

Snyder, Jack (2000). *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist*. New York: W.W. Norton.

van Klinken, Gerry (2002). 'Indonesia's New Ethnic Elites.' Dalam Henk S. Nordholt dan Irwan Abdullah (eds.). *Indonesia: in Search of Transition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Whitehead, Laurence (2004). 'Bowling in the Bronx: the Uncivil Interstices between Civil and Political Society.' Dalam P. Bunnell dan P. Calvert (eds.). *Civil Society and Democratization*. London: Frank Cass.